

Received: November 6, 2024
Accepted: November 20, 2024
Published: November 25, 2024

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK DALAM PENGEMBANGAN ELECTRIC VEHICLE: STUDI KASUS INVESTASI DI INDONESIA PERIODE 2014-2023

Kanzi Pratama Artananda Naufal
Universitas Paramadina, Indonesia
E-Mail: kanzipratamaan@gmail.com

Ica Wulansari
Universitas Paramadina, Indonesia
E-Mail: ica.wulansari@paramadina.ac.id

Abstract

In the past decade, China has emerged as a global economic power with significant geopolitical influence, reshaping the international power distribution. As the world's second-largest economy and leading exporter, China's role in global trade and foreign direct investment is crucial. However, this economic growth comes with considerable environmental challenges, notably high greenhouse gas (GHG) emissions that make China one of the world's top emitters. To address these challenges, China has implemented a range of low-carbon economic policies, including climate resilience targets and a shift toward renewable energy. One of China's primary strategies for achieving its low-carbon goals is the electrification of the transportation sector, with a focus on electric vehicle (EV) development. This policy aims not only to reduce air pollution and dependence on fossil fuels but also to boost the green technology industry. However, the electrification efforts create a high demand for essential resources, such as nickel, a key component in EV batteries. Indonesia, as one of the world's largest nickel producers, has become a strategic partner for China in meeting these resource demands. Through substantial investments in the mining and nickel processing industries, China has strengthened its economic ties with Indonesia while supporting the growth of Indonesia's EV infrastructure. China's Belt and Road Initiative (BRI) also plays a crucial role in enhancing infrastructure connectivity and investment in Southeast Asia, particularly in Indonesia, which has been one of the major recipients of BRI investments.

Keywords: Bilateral, Decarbonization, Chinese Investment, Electric Vehicle, National Interest

Introduction

Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik dominan pada tatanan global. Tiongkok muncul sebagai negara adidaya baru yang bangkit dan menciptakan suatu distribusi kekuatan baru pada geopolitik global yang ditandai dengan prestasi signifikan Tiongkok dalam bidang ekonomi (Grosse et al., 2021). Kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang dimiliki Tiongkok dibuktikan dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar US\$18.566 miliar dan GDP per kapita sebesar US\$13.16 ribu, negara eksportir terbesar di dunia dengan nilai US\$3.593 miliar dan investasi modal asing terbesar kedua dengan nilai US\$163.12 miliar (Forbes India, 2023; Statista, 2022; People's Daily, 2023). Hal ini mendeskripsikan kekuatan ekonomi Tiongkok yang cukup matang pada tata ekonomi global. Oleh karena itu, Tiongkok telah membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan relevan sebagai pemain utama dalam geopolitik global.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok mendorong Tiongkok untuk terlibat lebih aktif pada upaya mengurangi dampak lingkungan melalui transisi menuju Low-Carbon Economy dan Climate Resilience (World Bank, 2022).

Tiongkok mengakui bahwa perubahan iklim dapat membahayakan kesejahteraan jangka panjang. Di sisi lain, dunia dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan komitmen green economy sebagai bagian dari tujuan pembangunan. World Bank (2022) tentang Country Climate and Development Report (CCDR) menyebutkan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk mencapai Low Carbon Emission sebelum tahun 2030 dan Net Zero Emission sebelum tahun 2060. Laporan tersebut menjelaskan bahwa tingkat Gas Rumah Kaca (GRK), jumlah penduduk dan infrastruktur menyebabkan Tiongkok rentan terhadap risiko iklim. Dampak atas perubahan iklim adalah ancaman bagi kota-kota dekat pesisir Tiongkok yang dihuni oleh seperlima penduduk Tiongkok dan berkontribusi terhadap seperlima GDP Tiongkok.

Investasi dalam Electric Vehicle (EV) di Indonesia menjadi semakin relevan dalam konteks pengembangan infrastruktur regional dan transformasi ekonomi yang dipengaruhi oleh Belt Road Initiative (BRI) yang diperkenalkan oleh Tiongkok. Sebagai bagian dari strategi BRI, Tiongkok mengupayakan meningkatnya konektivitas di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. dengan mempertimbangkan potensi dalam

pengembangan Five Connectivity Index. Dalam hal ini, investasi pada infrastruktur EV tidak hanya memperkuat konektivitas regional, tetapi juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indonesia merupakan fokus penting bagi rencana strategis Tiongkok melalui peluang investasi dan pengembangan infrastruktur EV di Indonesia dengan kontribusi terhadap perubahan positif dalam mobilisasi transportasi dan penurunan emisi karbon di Indonesia (Gong, 2019).

Dalam tatanan internasional modern, kebutuhan akan sumber daya energi, khususnya batu bara telah menjadi sumber energi sejak lima dekade terakhir. Menurut Hafner dan Tagliapietra (2020) Tiongkok abad ke-21 berperan sebagai produsen EBT akibat perkembangan pesat dalam industri EBT, terutama dalam bidang energi surya dan angin. Dengan peran sebagai produsen terbesar panel surya dan turbin angin dunia, Tiongkok memiliki infrastruktur kuat dan kapasitas produksi mumpuni untuk memenuhi permintaan global mengenai teknologi BET. Selain itu, pemerintah Tiongkok aktif mendukung investasi bidang EBT dan skala ekonomi yang cukup untuk menjadikan Tiongkok sebagai pilihan bagi banyak negara untuk mengadopsi teknologi EBT. Potensi EBT

dan sumber daya melimpah serta komitmen kuat untuk mengurangi emisi karbon mengakselerasi pertumbuhan EBT. Langkah ambisius Tiongkok dalam melakukan elektrifikasi kendaraan semakin relevan dan krusial mengingat dampak dari polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Demikian, EV menggunakan batu bara dalam proses elektrifikasi.

Elektrifikasi telah menjadi bagian dari upaya dekarbonisasi. Elektrifikasi menjadi kritis dalam mengurangi emisi GRK dengan peningkatan efisiensi dan peningkatan pangsa EBT dalam produksi listrik (World Economic Forum, 2019). Proyeksi ini mendorong konsumsi energi akhir untuk terus meningkat dalam pangsa listrik bersaFema dengan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik juga akan meningkat secara substansial. (World Economic Forum, 2019).

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan global atas listrik untuk memenuhi 45% permintaan EBT yang juga menyebabkan peningkatan batu bara dan gas yang berimplikasi terhadap peningkatan emisi bersih sebesar 2.5% pada sektor EBT. Demikian, peningkatan permintaan listrik sebesar 20% disebabkan oleh perubahan iklim yang memperkuat kebutuhan mengenai pendinginan dan pemanasan,

jadi, walaupun produk akhir dari elektrifikasi menggunakan batu bara dalam prosesnya, hal tersebut tetap berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan penurunan emisi GRK. Selain itu, pembaruan pembangkit listrik, EBT dan dekarbonisasi juga perlu memberi manfaat terhadap keamanan energi dan kualitas udara perkotaan (World Economic Forum, 2019). Oleh karena itu, elektrifikasi kendaraan yang dalam prosesnya menggunakan batu bara menjadi krusial dalam mendorong dekarbonisasi pada sektor transportasi, mengingat pertumbuhan dan jumlah kendaraan bahan bakar fosil yang meningkat.

Langkah-langkah untuk mengurangi emisi GRK melalui adopsi EV menjadi semakin penting. Banyak negara anggota ASEAN mulai meningkatkan penetrasi EV melalui berbagai kebijakan, termasuk insentif fiskal seperti pembebasan pajak, penyesuaian biaya karbon terhadap harga kendaraan dan insentif berulang seperti pengenaan karbon sebagai pajak bahan bakar atau tarif pengisian daya dinamis untuk EV. Selain itu, kebijakan peraturan seperti penghematan bahan bakar dan standar gas buang serta insentif non-finansial seperti pembangunan infrastruktur transportasi publik, parkir gratis, dan zona rendah emisi juga telah

diterapkan (IESR, 2023; Wulansari dan Aziz, 2023).

Methods

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep neoliberal Hayek (1994) sebagai pisau analisis dan teori kepentingan nasional Nuechterlein (1976) Tiongkok dalam pengembangan EV di Indonesia. Peneliti melihat terdapat ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi negara penghasil baterai listrik terbesar di Asia Tenggara dengan potensi ketergantungan kepada Tiongkok sebagai pemilik teknologi pengolah nikel. Teori dan konsep tersebut akan menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran neoliberal Hayek digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana peran investasi asing, liberalisasi perdagangan dan diplomasi ekonomi serta dampak lingkungan untuk menganalisis pengembangan EV di kawasan ASEAN khususnya Indonesia mengedepankan peran ketergantungan dan kerja sama internasional dalam menjelaskan hubungan antar aktor internasional. Dalam konteks EV, konsep ini menggambarkan bagaimana negara terlibat dalam pengembangan industri

baterai listrik serta bagaimana ketergantungan dan kerja sama menciptakan peran penting dalam perkembangan industri baterai listrik di Indonesia.

Paradigma Neoliberal

Dalam pengembangan EV, paradigma neoliberal Hayek (2008) memiliki peran penting dalam dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Paradigma ini didasarkan oleh mekanisme pasar bebas, perdagangan bebas, persaingan, inovasi dan efisiensi, penemuan pasar baru serta Foreign Direct Investment (FDI). Kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara berada pada persaingan dan pasar bebas serta peluang pasar baru industri EV bagi produsen untuk bersaing secara kompetitif. Pembukaan pasar baru menjadi fokus pendekatan neoliberal guna mendorong perdagangan bebas lebih luas dan mendorong produsen EV untuk mengeksplorasi potensi ekonomi di Asia Tenggara serta kontribusi produsen EV terhadap pertumbuhan industri EV global.

Pemikiran Hayek (2008) juga menekankan peran persaingan pasar dan pembatasan peran pemerintah dalam pengembangan industri EV. Persaingan pasar digunakan sebagai stimulan untuk inovasi dan efisiensi, sedangkan pembatasan

pemerintah berperan untuk menegakkan regulasi dan standar regulasi untuk perlindungan keamanan dan lingkungan. Kedua aspek ini menciptakan lingkungan sinergis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan teknologi sektor EV.

Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara menuju negara lain dengan kepemilikan langsung atau pengendalian langsung atas aset produktif pada negara tujuan investasi (Gilpin dan Gilpin, 2002). Kehadiran Perusahaan Multinasional dalam perekonomian global memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan negara. Kehadiran Perusahaan Multinasional dapat membawa manfaat seperti peningkatan ekspor dan upah serta pembukaan lapangan kerja, sedangkan ketidakhadiran Perusahaan Multinasional dapat mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sejarah FDI menunjukkan bahwa bentuk investasi telah mengalami perubahan dari bentuk vertikal menuju horisontal yang dipengaruhi oleh revolusi informasi, manufaktur dan integrasi jasa serta pergeseran strategi investasi Perusahaan Multinasional. Selain itu, deregulasi pasar keuangan, perubahan teknologi dan keuntungan komparatif juga memengaruhi

internasionalisasi bisnis dan evolusi FDI (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Dalam industri EV di Indonesia, FDI memiliki implikasi terhadap peningkatan modal dan teknologi serta infrastruktur pengembangan industri EV di Indonesia. FDI membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk berkolaborasi dalam jejaring penelitian, produksi dan pemasaran global guna memperkuat daya saing industri EV di Indonesia di pasar internasional. Adaptasi menuju produksi lebih fleksibel sesuai tren teknologi dan permintaan pasar yang berkembang pesat didorong oleh perubahan dalam metode produksi dan organisasi industri (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Kepentingan Nasional

Menurut Nuechterlein (1976) kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan negara berdaulat dalam relasinya dengan lingkungan eksternal. Relasi ini diperoleh melalui proses politik domestik dan akomodasi pandangan yang beragam. Definisi ini berkaitan dengan negara independen secara politik dengan kekuatan dan kebijakan guna mencapai tujuan luar negeri yang didasarkan pada pertahanan; ekonomi; tatanan internasional; dan ideologi. Tujuan ini melibatkan perlindungan terhadap wilayah dan warga

negara, peningkatan ekonomi melalui kerja sama internasional, interaksi melebihi batas negara dan perlindungan terhadap nilai-nilai ideologi dari ancaman negara lain.

Nuechterlein (1976) mengklasifikasikan kepentingan nasional dalam ekonomi global. Pertama, kepentingan pertahanan. Kepentingan ini merujuk pada upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman eksternal yang berbentuk militer dan non-militer. Kedua, kepentingan ekonomi, kepentingan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara melalui pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari persaingan tidak adil dan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kepentingan tatanan internasional. Kepentingan ini mencakup peran atau posisi suatu negara dalam hubungan internasional, termasuk partisipasi dalam organisasi internasional, diplomasi dan perjanjian perdagangan serta promosi kepentingan nasional. Keempat, kepentingan ideologis. Kepentingan ini menjadi upaya menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan keyakinan tertentu yang dianggap penting dalam berinteraksi dengan negara luar. Oleh karena itu, seluruh kepentingan ini membentuk

landasan kebijakan luar negeri suatu negara dan memengaruhi strategi ekonomi politik pada tingkat domestik atau internasional.

Diplomasi Bilateral

Rana (2013) menjelaskan kerja sama bilateral sebagai suatu proses dua negara bekerja sama dalam berbagai bidang guna mencapai tujuan bersama atau saling memberi keuntungan atau manfaat. Kerja sama dilakukan melalui pertukaran informasi, sumber daya, bantuan dan teknologi dengan kesepakatan atau perjanjian tertentu. Hubungan diplomatik menjadi fokus pada representasi perlindungan kepentingan, negosiasi dan promosi hubungan persahabatan untuk memperkuat hubungan antar negara dan menjaga serta meningkatkan stabilitas regional dan perdamaian global. Dengan diplomasi bilateral, kedua negara dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, mempromosikan kepentingan bersama, memperluas jaringan kerja sama dan menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan dan kemajuan kedua negara.

Multi Track Diplomacy

Diamond dan McDonald dalam Mujiono dan Frisca (2019) mengemukakan sebuah konsep diplomasi yang menggabungkan

track formal dan informal guna menciptakan perdamaian dunia dalam sistem internasional. Tujuan diplomasi ini adalah mencapai perdamaian dunia melalui peace building yang terintegrasi dengan menggunakan soft power dengan mengadopsi pendekatan sistem dalam sifat peace building yang terstruktur. Aktivitas dari struktur peace building menciptakan kerangka kerja institusional yang memungkinkan di berbagai aspek, baik ekonomi, bisnis dan infrastruktur. Struktur peace building menjadi penting karena konflik tidak dapat diselesaikan secara terpisah dengan pembangunan ekonomi.

Mujiono dan Frisca (2019) menjelaskan bahwa track pertama yakni pemerintah didasarkan pada 9 kepentingan nasional dalam pelaksanaannya. Pertama, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi pada industri EV bertujuan menciptakan lapangan kerja, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan produksi, distribusi dan layanan purna. Kedua, kepentingan perdagangan nasional. Produksi dan perdagangan EV dapat memengaruhi neraca perdagangan negara dengan penurunan ketergantungan impor bahan bakar fosil dan promosi ekspor EV serta komponen pendukung EV. Ketiga, ilmu pengetahuan. Penelitian dan inovasi bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi mendorong pengembangan baterai, teknologi dan sistem pengisian EV lebih efisien. Keempat, kebudayaan. Adopsi EV mendorong perubahan budaya mengenai kesadaran lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini memengaruhi preferensi konsumen dan norma-norma sosial transportasi dan lingkungan. Kelima, pendidikan. Pendidikan mengenai teknologi dan manfaat EV dapat mendorong pemahaman dan promosi adopsi EV. Keenam, Hak Asasi Manusia. Pemanfaatan EV membantu masyarakat menurunkan polusi udara guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup sehat. Ketujuh, bantuan kemanusiaan. Penggunaan EV memperluas akses transportasi publik yang terjangkau dan ramah lingkungan bagi publik yang tidak memiliki transportasi atau infrastruktur transportasi. Kedelapan, politik, peran pemerintah sebagai regulator menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan EV melalui insentif fiskal, regulasi lingkungan dan dukungan penelitian serta pengembangan. Kesembilan, kontrol terhadap senjata. Meskipun tidak terkait langsung, secara strategis pengembangan industri EV memengaruhi keamanan dan diversifikasi serta kemandirian sumber energi.

Mujiono dan Frisca (2019) mendasari kepentingan nasional track ketiga yaitu bisnis pada tiga aspek utama. Pertama, keberlanjutan lingkungan. Pengembangan EV perlu memerhatikan aspek sosial dan lingkungan bisnis. Penggunaan EV dianggap sebagai upaya mewujudkan perubahan positif menuju sistem perdagangan internasional yang ramah lingkungan. Kedua, pengembangan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari komponen ekologi, ekonomi dan sosial. Pengembangan EV dikategorikan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dalam ekologi melalui penurunan polusi, ekonomi melalui pertumbuhan industri berkelanjutan dan sosial (memberi manfaat sosial). Ketiga, pandangan bisnis. Pandangan bisnis diartikan sebagai bisnis berkelanjutan dan memerhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Pengembangan EV tidak hanya berfokus pada profit, tetapi memberi dampak sosial, lingkungan dan kesejahteraan secara luas.

Result and Discussion

Kepentingan dalam Dekarbonisasi Tiongkok telah menetapkan pengembangan ekonomi ramah lingkungan dan rendah karbon sebagai prioritas agenda dalam beberapa dekade ke depan. Upaya ini diarahkan oleh State Council

guna membentuk sistem produksi, sirkulasi dan konsumsi ramah lingkungan dan meningkatkan lingkungan ekologis melalui “Beautiful China” pada tahun 2035 (China Briefing, 2022). Transformasi ekonomi dan sosial diperlukan guna merespon pelepasan emisi GRK dunia dan kapasitas instalasi batu bara. Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping menyampaikan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Tiongkok mempersiapkan rencana dekarbonisasi melalui penetapan target penurunan emisi karbon dengan tujuan Zero Carbon Emission tahun 2030 dan Carbon Neutrality tahun 2060 (Xinhua.net, 2020).

State Council pada tahun 2021 mengeluarkan Guiding Opinions of the State Council on Accelerating the Establishment and Improvement of a Green, Low-carbon and Recycling Economic System sebagai tujuan menuju sistem ekonomi hijau (State Council Information Office of the People's Republic of China, 2021a). Guiding opinions ini juga mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya selain energi fosil dan mekanisme pembuangan polutan serta pengembangan industri untuk perlindungan lingkungan.

Tiongkok juga memantapkan komitmen untuk mempercepat dekarbonisasi melalui Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy dan the Action Plan for Reaching Carbon Dioxide Peak Before 2030 pada tahun 2021 sebagai realisasi komitmen KTT COP26. Dua dokumen ini menjadi kerangka kebijakan iklim Tiongkok guna mencapai target 1+N untuk menurunkan emisi karbon (China Briefing, 2022) (State Council Information Office of the People's Republic of China, 2021b)(State Council Information Office of the People's Republic of China, 2021c).

Kerangka kerja 1+N merupakan pedoman untuk mencapai tujuan iklim (China Briefing, 2022). “1” mewakili pedoman kerja dan “N” mewakili dokumen kebijakan tambahan yang mencakup beragam sektor dan tujuan. Dokumen ini meliputi strategi dekarbonisasi yang mencakup transisi menuju energi dan metode berkelanjutan, termasuk industri berat, ekonomi sirkular, pertanian dan transportasi. Kebijakan-kebijakan pendukung didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kapasitas penyerapan karbon, penghitungan karbon, dukungan fiskal dan

finansial serta inspeksi dan penilaian dekarbonisasi. Tiongkok mengalami peningkatan investasi EBT dalam satu dekade terakhir. Kapasitas instalasi EBT Tiongkok mencapai angka tertinggi pada tahun sebesar 1.063 Giga Watt (GW) atau menyumbang 44,8% dari total kapasitas pembangkit listrik di Tiongkok (National Energy Agency (NEA) dalam China Briefing, (2022). Namun, konsumsi listrik Tiongkok masih dominan berasal dari bahan bakar fosil dengan peningkatan 4,6% pada tahun 2021 (National Bureau Statistic (NBS) dalam China Briefing, (2022). Meskipun terdapat komitmen terhadap dekarbonisasi, ketergantungan pada batu bara tetap tinggi demikian, Tiongkok memandang keamanan energi sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Tingginya tingkat konsumsi listrik di Tiongkok menyebabkan pemadaman listrik bergilir pada 17 negara bagian di wilayah perkotaan dan penutupan pabrik pada tahun 2021 (China Briefing, 2022). Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan dan pengurangan produksi batu bara sebagai respon terhadap kebijakan pengurangan intensitas energi yang terjadi bersamaan dengan lockdown Covid-19 dan faktor eksternal seperti kemacetan rantai pasok, harga komoditas dan instabilitas

geopolitik dari perang Rusia-Ukraina tahun 2022 (The Diplomat, 2021). Presiden Xi Jinping menekankan bahwa transformasi hijau dilakukan secara bertahap bersama dengan upaya meningkatkan diversifikasi sumber energi dan transisi ramah lingkungan serta rendah karbon (China Briefing, 2022). Langkah ini adalah perbaikan dalam pengukuran emisi karbon, pengembangan pasar perdagangan karbon dan teknologi ramah lingkungan serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Kepentingan Nasional Tiongkok Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan Tiongkok terkait kebutuhan akan energi yang berkelanjutan dan upaya perluasan pengaruh melalui investasi infrastruktur. Penolakan Indonesia terhadap larangan ekspor mentah nikel di World Trade Organization (WTO) bersama Korea Selatan menyebabkan ketidakpastian pasokan nikel global, terutama bagi industri baterai EV (Tritto, 2023). Menurut Foss dan Koelsch (2022) Tsinghan Holding Group sebagai produsen nikel terbesar Tiongkok berusaha memperkuat posisi di Indonesia melalui perluasan produksi laterit dan pasokan nikel dengan kemurnian rendah untuk industri baterai. Upaya ini memberikan dampak signifikan terhadap

rantai pasok EV, tetapi menyebabkan dilem bagi Indonesia dalam penarikan investasi dan optimalisasi nilai sumber daya nikel. Kebijakan perdagangan dan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan global serta biaya konsumen dan bisnis.

Foss dan Koelsch (2022) menggambarkan kepentingan Tsinghan dan Tiongkok serta pemerintah Inonesia dalam upaya meningkatkan nilai tambah pada sektor SDA melalui empat aspek. Pertama, warisan tambang Tiongkok digagas oleh Tsinghan melalui FDI sejak tahun 2007 di pulau Sulawesi. Tsinghan berfokus pada produksi dan pemurnian nikel serta menciptakan integritas vertikal dalam rantai pasok nikel global. Keberhasilan Tsinghan memiliki peran penting terhadap perkembangan industri nikel di Indonesia dalam situasi ketidakpastian regulasi. Di sisi lain upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan rantai pasok nikel menunjukkan ambisi dalam tren EV, walaupun terdapat ketergantungan terhadap FDI.

Kedua, Tsinghan merupakan pelopor eksplorasi cadangan nikel di Indonesia. Tsinghan bergerak cepat merespon permintaan nikel dari sektor EV dengan memasok nikel matte sebagai bahan

baterai. Namun, Tsinghan memiliki risiko finansial, lingkungan dan intensitas energi dalam jangka panjang serta replikasi teknologi pemrosesan nikel dalam kekosongan pasokan kelas baterai sebagai tantangan jangka pendek (Foss dan Koelsch, 2022).

Ketiga, tanggung jawab Environmental, Social and Government (ESG). Tanggung jawab ESG pada pemrosesan nikel adalah penggunaan energi dan pembuangan limbah. Produksi nikel kelas 1 dari bijih sulfida lebih efisien secara energi daripada bijih laterit yang memerlukan tiga kali lipat energi. Indonesia sangat bergantung pada batu bara guna pemrosesan nikel domestik dalam menghadapi peningkatan polusi yang timbul dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Pengembangan EBT dalam mengatasi polusi udara memerlukan waktu panjang, sementara bahan bakar fosil menjadi basis pemrosesan nikel di Indonesia dalam jangka pendek dan menengah. Metode hidrometalurgi melalui High Pressure Acid Leaching (HPAL) dalam pengolahan nikel limbah beracun yang sukar dikelola dan berpotensi membawa dampak buruk pada lingkungan. Undang-Undang Omnibus tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengakuisisi lahan dan

menghapus batasan lingkungan secara sepihak. Pemerintah Indonesia diharapkan menyusun regulasi yang berkelanjutan dalam penetapan standar ESG bagi entitas yang beroperasi di Indonesia (Foss dan Koelsch, 2022).

Keempat, konflik pemerintah dan perusahaan. Konflik ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk meningkatkan kontrol pada sektor SDA. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil profit lebih dari aktivitas pertambangan melalui peraturan mengenai kepemilikan dan persyaratan fiskal. Nasionalisasi Grasberg pada tahun 2018 menyebabkan revisi Undang-Undang dan regulasi pertambangan di Indonesia (Foss dan Koelsch, 2022).

Pemerintah Indonesia mendorong ekspansi pemrosesan nikel sebagai prinsip utama dalam kebijakan industri strategis dan pengelolaan sumber daya. Melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memiliki sejumlah proyek strategis telah diidentifikasi sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat proyek yang tergolong bagian dari prioritas nasional (Foss & Koelsch, 2022).

Dalam konteks pelarangan ekspor bijih nikel, pemerintah telah menambahkan pabrik peleburan nikel dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini merupakan komitmen dalam pemrosesan nikel dalam negeri. Jadi, perubahan dalam pengawasan pertambangan dapat meningkatkan kontrol pemerintah pusat atas praktik pertambangan yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk mempercepat proses birokrasi negara, mencapai keseimbangan lebih baik antara PMA yang berisiko dalam sektor pertambangan, pemrosesan dan penambahan nilai serta meningkatkan kontrol pemerintah terhadap industri nikel secara keseluruhan. Demikian, Indonesia juga mengharapkan nilai tambah dari industri nikel dan berguna memajukan perekonomian nasional Indonesia (Foss & Koelsch, 2022).

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi Tiongkok pada pengembangan EV di Indonesia didorong oleh tiga aspek. Pertama, pasar nikel. Dinamika pasar nikel sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas, pengaruh kualitas, pemanfaatan instrumen keuangan, tren konsumsi dan pengaruh kebijakan pemerintah. Fluktuasi tajam pada harga

komoditas adalah masalah utama bagi industri ekstraktif baik pertambangan dan minyak gas. Perubahan harga menyebabkan pergeseran dalam keseimbangan pasokan dan permintaan serta faktor-faktor fundamental lain. Hal ini menyebabkan instabilitas dalam operasi bisnis dan investasi. Kualitas bijih mineral dan kualitas nikel sangat memengaruhi harga dan pendapatan serta return investasi. Produsen menjadi price takers dengan kontrol atas faktor utama yang memengaruhi harga seperti pasokan dari sumber kompetitor. Kontrak berjangka dan hak-hak lain dalam instrumen pasar digunakan oleh pelaku pasar untuk mengelola dan memanfaatkan risiko harga nikel. Perusahaan pertambangan menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari harga nikel yang turun dan melindungi arus kas. Kebijakan pemerintah mendorong pengolahan dalam negeri untuk lebih berkontribusi pada pasar nikel global dan menimbulkan reaksi dari negara-negara lain atau organisasi perdagangan internasional (Foss & Koelsch, 2022).

Kedua, risiko dan ketidakpastian tren industri pertambangan. Tren pertambangan menjelaskan bahwa operasionalisasi mereka berada dalam batas risiko dan ketidakpastian, penurunan kualitas bijih

nikel, ketergantungan pada harga dan teknologi dan perubahan dalam pasar dan teknologi. Risiko dan ketidakpastian disebabkan oleh banyak faktor baik kondisi pasar dan faktor-faktor regulasi, sedangkan ketidakpastian berfokus pada kondisi geologi dan teknis dibawah permukaan bumi seperti biaya ekstraksi dan kompleksitas operasi pertambangan. Lazimnya, kualitas bijih mineral cenderung menurun karena produsen cenderung mengeksploitasi lokasi kandungan mineral terbanyak dengan biaya produksi terendah dahulu. Penurunan kualitas bijih dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan tantangan tambahan. Kenaikan harga nikel dapat mendorong eksploitasi yang kurang menguntungkan secara ekonomi, namun, terdapat tantangan terkait biaya operasional yang lebih tinggi untuk operasi di lokasi dengan kondisi geologis lebih sulit. Jika terdapat penemuan sumber daya baru dan pengembangan teknologi maka hal ini dapat memengaruhi dinamika pasar dan operasi pertambangan nikel. Penemuan sumber daya baru dapat memperbarui cadangan global, sementara perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan eksploitasi lokasi yang lokasi sebelumnya dinilai tidak ekonomis (Foss & Koelsch, 2022).

Ketiga, kualitas nikel. Keseimbangan pasokan dan permintaan global untuk komoditas terdapat kompleksitas inheren dalam sisi kualitas. Hal ini mengartikan pasokan dan rantai pasok untuk memenuhi permintaan tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada bentuk kimia dan kualitas dasar sumber daya serta implikasinya terhadap proses mulai dari pengolahan, penyulingan dan logistik (Foss & Koelsch, 2022). Menggunakan analogi minyak 'berat' yang memiliki berat jenis lebih tinggi terhadap air daripada minyak 'ringan' dan lazimnya tinggi sulfur. Minyak berat dijual dengan harga diskon terhadap indeks harga minyak mentah yang diperdagangkan berdasarkan minyak mentah ringan karena memerlukan peningkatan biaya dalam kompleksitas penyulingan untuk memperoleh volume produk yang digunakan sebagai bensin dan bahan bakar pesawat terbang. Jika investasi cukup dilakukan untuk menyuling minyak berat maka minyak tersebut dapat bersaing lebih efektif dengan minyak ringan. Hasilnya adalah harga yang lebih baik bagi produsen dan penjual minyak berat. Selain itu, manfaat yang diperoleh lainnya adalah ekspansi pasokan yang tersedia untuk pasar dan menjaga harga keseluruhan produk-produk minyak bumi agar

terjangkau bagi konsumen (Foss & Koelsch, 2022).

Kepentingan Tata Dunia

Tan (2021) menyebutkan bahwa kebangkitan Tiongkok dalam tata dunia disebabkan oleh perubahan strategi geopolitik dan situasi politik Asia Tenggara yang dinamis. Investasi Tiongkok berkembang secara stabil bersama dengan pasar aset. Tiongkok memiliki keunggulan dalam pembangunan ekonomi melalui tiga aspek. Pertama, geografis dan SDA. Tiongkok memiliki SDA melimpah seperti sumber daya air dan cadangan batu bara. Selain itu, luas wilayah yang besar memberikan potensi untuk eksploitasi SDA lebih luas daripada negara lain (Tan, 2021).

Kedua, ilmu pengetahuan, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Tiongkok memberi perhatian khusus pada pengembangan sains, teknologi dan SDM. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan SDM telah mendongkrak kekuatan ilmiah dan teknologi Tiongkok yang solid dan membentuk tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah besar (Tan, 2021).

Ketiga, kekuatan nasional komprehensif. Tiongkok telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dan menjadikan

mereka sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Tiongkok memiliki sistem industri yang lengkap dan mandiri serta kemampuan untuk memproduksi barang-barang vital secara mandiri. Selain itu, Tiongkok berhasil membangun kelompok ilmiah dan teknologi yang kuat serta memiliki mekanisme insentif untuk menarik talenta-talenta berbakat (Tan, 2021).

Keempat, pengawasan stabilitas politik negara investasi, perlindungan hukum yang mantap, kebijakan investasi yang terbuka dan kerja sama internasional. Foss & Koelsch (2022) menyoroti “Obsolescing bargains” sebagai kekuatan pemerintah tuan rumah yang semakin menguat dan pengaruh MNC yang semakin melemah. Konsep ini berkenaan dengan era nasionalisasi sumber daya pada tahun 1970-1980 saat pemerintah tuan rumah mulai menerapkan kebijakan yang lebih memihak kepada kepentingan tuan rumah dalam eksploitasi SDA atau membatasi kepemilikan asing.

Dalam hal ini, pengembangan EV dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia mengambil sikap berbeda dan menguntungkan mereka dalam negosiasi dengan investor asing. Hal ini hanya dapat terjadi jika pemerintah Indonesia memiliki pengalaman cukup dan mampu mengelola

teknis serta finansial proyek tersebut. Kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tuan rumah menerima usulan negosiasi adalah penurunan kualitas bijih dan biaya operasional yang meningkat. Hal ini berdampak buruk terhadap pendapatan dan prioritas sosial. Hal ini mendorong pemerintah untuk melonggarkan regulasi dan kebijakan yang mendorong investasi dan produksi berkelanjutan (Foss & Koelsch, 2022).

Kehadiran investor Tiongkok dalam industri EV mencerminkan fenomena *obsolescing bargains* yaitu kekuatan investasi Tiongkok menjadi signifikan dalam konteks global. Meskipun Tiongkok memiliki pengaruh besar dalam industri EV, pemerintah Indonesia dapat mengambil celah sikap lebih proaktif dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri EV dalam negeri dan memastikan bahwa PMA dapat memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi dan masyarakat (Foss & Koelsch, 2022).

Dinamika hubungan antara Tiongkok-Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor regional terutama isu-isu geopolitik yang berkembang di Laut Cina Selatan. Sebagai wilayah yang penting secara

strategis, Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian bagi negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dan Tiongkok. Perbedaan dalam klaim wilayah dan SDA di Laut Cina Selatan telah menyebabkan ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut dan hal ini memengaruhi dinamika Tiongkok-Indonesia dalam berbagai aspek termasuk investasi dan kerja sama industri. Oleh sebab itu, kedua negara perlu mempertimbangkan dinamika regional dalam mengelola hubungan kedua negara (Foss & Koelsch, 2022).

Kepentingan Ideologis

Ba (2019) menjelaskan perspektif mainstream di kawasan adalah ketergantungan ekonomi asimetri memungkinkan Tiongkok untuk mengubah kekuatan ekonomi sebagai kekuatan politik guna mengejar kepentingan nasional, termasuk kemerdekaan politik, kedaulatan negara dan status internasional. Pertama, terdapat perspektif mainstream di kawasan bahwa ketergantungan ekonomi asimetris memungkinkan Tiongkok untuk menerjemahkan ekonomi kekuasaan menjadi kekuatan politik untuk melayani kepentingan strategisnya. Kepentingan strategis diklasifikasikan menjadi kemerdekaan politik, kedaulatan negara dan status internasional. Xi Jinping mempromosikan “Chinese Dream” yang

bertujuan mencapai kemakmuran kolektif dan peremajaan bangsa Tiongkok (Ba, 2019). Gill (2016) menggambarkan Chinese Dream sebagai upaya kebangkitan besar bangsa Tiongkok yang dicapai melalui kondisi eksternal yang baik bagi reformasi, pembangunan dan stabilitas Tiongkok. Visi ini mempromosikan dua aspirasi utama bagi rezim Xi Jinping yaitu visi untuk membangun masyarakat sejahtera dan visi menjadi negara yang telah mencapai titik puncak perkembangan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Komite Pusat Chinese Communist Party (CCP) tahun 2021 mengadopsi resolusi sejarah yang menjadikan Xi sejajar dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Resolusi ini menggambarkan Xi sebagai pemimpin inti, pemimpin utama dan pendiri utama dari sosialisme era baru Tiongkok yang disebut sebagai Marxisme Tiongkok kontemporer abad ke-21 (Peters 2017; Antonio, 2022). Salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok adalah menjaga hubungan stabil dan damai dengan negara tetangga. Hal ini dicerminkan dari konsep diplomasi periferal yang menjadi elemen sentral dari diplomasi Tiongkok era Xi. Selain itu, ditekankan pula persahabatan, kejujuran, manfaat bersama dan inklusivitas sebagai dasar hubungan Tiongkok dengan negara

tetangga. Tiongkok memiliki ambisi besar melalui seruan ‘diplomasi negara besar dengan karakteristik Tiongkok’ untuk memperkuat sosialis modern mereka. Jadi tujuan dari seruan tersebut bertujuan mempromosikan evolusi sistem tata kelola global dan mempertegas Tiongkok sebagai mitra konstruktif yang memiliki tujuan memperkuat multilateralisme dan kerja sama internasional. Dengan demikian, Tiongkok tidak hanya mengejar hubungan yang saling menguntungkan, tetapi juga mempertahankan kepentingan nasional secara kokoh di regional global (Antonio, 2022). Kedua, naratif untuk mengkonstruksi identitas politik dan nasional dan memengaruhi persepsi mengenai negara di tingkat internasional. Ketiga, naratif dimensi strategis untuk memengaruhi dan membentuk realitas geopolitik serta mengelola harapan dan tujuan Tiongkok serta mengubah lingkungan diskursif (Ba, 2019).

Lebih lanjut, menurut Peters (2017) Xi telah mencanangkan Chinese Dream dalam rencana pengembangan dua tahap jangka panjang yaitu tahap pertama dimulai tahun 2020-2035 dan tahap kedua tahun 2035-2050. Tahap pertama bertujuan mewujudkan modernisasi sosialis, salah satunya melalui BRI dan tahap kedua bertujuan mengembangkan negara sosialis

modern besar yang sejahtera, kuat, demokratis, berbudaya, harmonis dan indah. Selain itu, Tiongkok siap membuka diri dengan globalisasi yang kompetitif, bunga pasar berbasis pasar dan kurs valuta asing serta akses pasar lebih besar dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak investor asing. Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah peningkatan tata kelola berbasis hukum dengan penekanan pada kepatuhan terhadap konstitusi, anti korupsi dan komitmen manajemen ekologis serta perlindungan ekosistem alam. Demikian menurut Peters (2017) Chinese Dream tidak hanya diklasifikasikan sebagai keinginan materiisme saja, karena hal itu tidak dapat memperkuat nilai-nilai budaya dan lingkungan berkelanjutan atau memberi kepuasan sosial. Chinese Dream juga perlu mencerminkan aspirasi lebih besar untuk sebuah bangsa termasuk nilai-nilai budaya dan ekologis berkelanjutan. Untuk itu, penting bagi Tiongkok untuk menjaga aturan sosial dan kebijakan yang bertujuan membangkitkan moralitas dengan dasar Konfusius dan nilai Mao.

Investasi Tiongkok dalam proyek BRI secara strategis memiliki probabilitas mengarah pada “Debt trap diplomacy” dengan menempatkan negara-negara mitra dalam lingkaran utang sehingga dapat

meningkatkan pengaruh politik disertai pengembalian dana investasi berskala besar menyebabkannya bersifat lambat dan berisiko (Behuria, 2018). Tiongkok dinilai memiliki suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Dalam hal ini, negara-negara mitra perlu menyadari bahwa beban utang yang tinggi berpotensi kepada penyerahan aset-aset vital nasional. Oleh karena itu, banyak negara mitra yang membatalkan, menangguhkan dan meninjau ulang BRI. Ini sejalan dengan upaya memperkuat hegemoni dan geopolitik Tiongkok dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI) untuk mendorong ekonomi (perdagangan) terbuka, menjalankan komitmen nilai liberal dan pemimpin rezim perdagangan serta mendorong negara lain untuk melakukan liberalisasi ketat (Bakry, 2019).

Ba (2019) menjelaskan peran naratif Tiongkok dalam membangun identitas politik, pandangan dan ideologi serta bagaimana naratif-naratif tersebut digunakan dalam sektor politik untuk memengaruhi persepsi dan perilaku baik dalam negeri dan tingkat internasional. Naratif-naratif tersebut secara spesifik mengatur hubungan Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN.

Menurut Ba (2019) peran naratif Tiongkok tersusun atas tiga jenis. Pertama, naratif tersebut digunakan untuk

menyederhanakan situasi yang kompleks menjadi rangkaian peristiwa yang lebih terstruktur. Hal ini membantu Tiongkok memberikan makna dan tatanan dari dunia sekitar yang bertujuan memberikan petunjuk untuk membuka langkah-langkah selanjutnya dalam situasi konkret. Kedua, naratif membantu dalam mengkonstruksi identitas politik dan nasional. Hal ini mencerminkan nilai-nilai, tujuan dan agensi sebagai aktor politik atau negara. Dengan membangun naratif yang kuat, sebuah negara dapat memengaruhi persepsi mengenai siapa mereka dan apa yang mereka wakili di tingkat internasional. Ketiga, naratif memiliki dimensi strategis yang utama. Mereka tidak hanya dipahami sebagai cerita-cerita, tetapi juga sebagai alat untuk memengaruhi dan membentuk realitas geopolitik. Naratif-naratif strategis secara sadar dimobilisasi oleh aktor politik untuk memperluas pengaruh, mengelola harapan atau tujuan Tiongkok di hadapan audiens domestik dan internasional. Mereka memiliki peran dalam mengubah lingkungan diskursif di tempat mereka beroperasi.

Conclusion

Dekarbonisasi adalah upaya global yang ditangani secara serius pada masa kini. Tiongkok telah menetapkan pengembangan ekonomi ramah lingkungan

dan rendah karbon sebagai prioritas agenda selama beberapa beberapa dekade ke depan. Upaya ini sejalan dengan tujuan Zero Carbon Emission tahun 2030 dan Carbon Neutrality tahun 2060. Tiongkok mengadopsi kerangka kebijakan Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality dan the Action Plan for Reaching Carbon Dioxide Peak Before 2030 Sebagai realisasi komitmen pasca KTT COP26. Kerangka ini bertujuan sebagai pedoman mencapai tujuan iklim dengan melibatkan sektor ekonomi dan teknologi ramah lingkungan. Tiongkok telah berkomitmen meningkatkan investasi dalam EBT, walaupun ketergantungan terhadap batu bara tetap tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menghadapi transformasi ekonomi hijau. Demikian, transformasi hijau dilakukan secara bertahap melalui diversifikasi energi, pengukuran emisi karbon, pasar perdagangan karbon dan regulasi lingkungan.

Tiongkok memiliki kepentingan kompleks dan luas dalam hubungan diplomatik dan bisnis dengan Indonesia. Tiongkok berupaya memperoleh pasokan nikel berkelanjutan dan perluasan pengaruh melalui investasi infrastruktur. Pengembangan industri EV di Indonesia sangat ditentukan oleh dinamika pasar nikel dan risiko serta ketidakpastian dalam tren industri pertambangan. Tatanan internasional merupakan faktor utama dalam membangun hubungan kuat dengan negara-negara di kawasan melalui proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi politik yang signifikan. Berangkat dari semangat Chinese Dream, Tiongkok berusaha memengaruhi persepsi internasional dan mencapai kepentingan

nasional. Semangat ini mendorong Tiongkok memperoleh keuntungan ekonomi politik skala global.

Strategic Partnership antara Tiongkok-Indonesia telah menghasilkan berbagai kesepakatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan kerja sama ekonomi. Dengan track pertama, kesepakatan antara kedua negara telah menghasilkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan, kereta api sampai pembangkit listrik. Track ketiga mengadopsi pendanaan proyek-proyek infrastruktur mercusuar seperti KCJB yang terkendala oleh masalah pendanaan. Proyek-proyek infrastruktur Tiongkok di Indonesia mencakup ekspansi infrastruktur, pembukaan akses pasar baru, promosi RMB dan pengurangan hambatan perdagangan internasional.

Industri EV di Indonesia memiliki implikasi, tantangan dan hambatan yang signifikan. Investasi Tiongkok dalam infrastruktur dan proyek transportasi memberi manfaat konkret terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, walaupun terdapat risiko mengenai utang dan kondisi perjanjian yang dapat merugikan negara mitra. Namun, terdapat skeptisisme, ketidakpercayaan dan pengaruh politik serta rivalitas dengan AS terhadap motivasi Tiongkok dalam investasi dan insiatif BRI. Langkah-langkah strategis juga dilakukan untuk mempercepat pengembangan EV melalui penguatan kerja sama internasional, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan aksesibilitas infrastruktur pengisian daya.

REFERENCES

- Ahmadani, F. R., & Aquary, R. (2021). The Importance of Public-Funded Charging Stations to Increase the Rate of Electric Vehicle (EV) Ownership in Indonesia. *Sociae Polites*, 22(1), 78–91.
<https://doi.org/10.33541/sp.v22i1.3507>.
- Antonio, J. (2022). The Chinese Dream of National Rejuvenation and Foreign Policy under Xi Jinping. *Agenda Internasional*, 29(40), 31–55.
<https://doi.org/10.18800/agenda.2022.01.002>.
- ASEAN. (2023). ASEAN Leaders' Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/07-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Developing-Regional-EV-Ecosystem-adopted.pdf>.
- ASEAN. (2023). ASEAN Leaders' Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/07-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Developing-Regional-EV-Ecosystem-adopted.pdf>.
- Ba, A. D. (2019). China's "Belt and Road" in Southeast Asia: Constructing The Strategic Narrative in Singapore. *Asian Perspective*, 43(2), 249–272.
<https://doi.org/10.1353/apr.2019.0010>.
- Bakry, S. U. (2019). *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Behuria, A. K. (2018). How Sri Lanka Walked into a Debt Trap, and the Way Out. *Strategic Analysis*; <https://www.semanticscholar.org/paper/How-Sri-Lanka-Walked-into-a-Debt-Trap-and-the-Way-Out/Behuria/1735f15a410f516e8df4dc5edf1f374eb76507e0>.
- Bisnis.com. (2023, September 22). Balada Kereta Cepat WHOOSH: Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang. *Bisnis.com*; *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230922/98/1697505/balada-kereta-cepat-whoosh-jebakan-utang-china-hingga-buang-buang-uang/2>.
- China Briefing. (2023, August 10). China's Electric Vehicle Supply Chain and Its Future Prospects. *China Briefing News*. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-electric-vehicle-supply-chain-and-its-future-prospects/>.
- CNN. (2023, February 14). Kilas Balik Proyek Kereta Cepat yang Biayanya Bengkak Jadi Rp110 T. *Ekonomi.cnnindonesia.com*. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230214142414-92-912895/kilas-balik-proyek-kereta-cepat-yang-biayanya-bengkak-jadi-rp110-t>.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>.
- Forbes India. (2023, February 7). The Top 10 Largest Economies In The World In 2023. *Forbes India*. <https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1>.
- Foss, M., & Koelsch, J. (2022). Need Nickel? How Electrifying Transport and Chinese Investment Are Playing

- Out In The Indonesian Archipelago. Baker Institute.
<https://doi.org/10.25613/30S0-Y623>.
- Fujimoto, T. (2012). Manufacturing Capability and the Architecture of Future Vehicles. In: Calabrese, G. (eds) The Greening of the Automotive Industry. Palgrave Macmillan.
- Gilpin, R & Gilpin, M, J. (2002) Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21. RajaGrafindo Persada.
- Gomółka, K., & Kasprzak, P. (2021). Directions and Prospects for the Development of the Electric Car Market in Selected ASEAN Countries. *Energies*, 14(22), 7509. <https://doi.org/10.3390/en14227509>.
- Gong, X. (2019). The Belt & Road Initiative and China's influence in Southeast Asia. *Pacific Review*, 32(4), 635–665. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1513950>.
- Grosse, R., Gamso, J., & Nelson, R. C. (2021). China's Rise, World Order, and the Implications for International Business. *Management International Review*, 61(1), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s11575-020-00433-8>.
- Hafner, M., & Tagliapietra, S. (2020). *The Geopolitics of the Global Energy Transition* (Vol. 73). Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-39066-2>.
- Hayek, F.A. (2008). *The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition* (B. Caldwell, Ed.) (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315728124>.
- Huang, N. (2023). *Emerging Markets Penetration Strategy in the Deglobalization Era — A Case Study of the NEV Industry in Southeast Asia*. Thesis. Massachusetts: MIT Sloan School of Management. <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/151560/huang-hnx228-msms-sloan-2023-thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Institute for Essential Services Reform. (2023). *Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023*. IESR. <https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-electric-vehicle-outlook-ievo-2023>.
- International Energy Agency. (2023). *Electric Car Sales 2016-2023*. International Energy Agency. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electric-car-sales-2016-2023>.
- International Renewable Energy Agency. (2022). *Renewable Energy Outlook for ASEAN: Towards a Regional Energy Transition* (2nd Edition). Irena.org. <https://www.irena.org/Publications/2022/Sep/Renewable-Energy-Outlook-for-ASEAN-2nd-edition>.
- Kartawinata, R, B., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). *Bisnis Internasional*. PT. Karya Manunggal Lithomas.
- Kementerian Investasi-BKPM. (2024). *Konferensi Pers Kinerja Investasi Tahun 2023* [YouTube Video]. In YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vB1sOb0SPKU>.
- Liputan 6. (2022, December 21). 10 Tahun Kemitraan Strategis Komprehensif, Hubungan China-Indonesia Diharapkan Kian Erat. [Liputan6.com](https://liputan6.com); [Liputan6](https://liputan6.com).

- <https://www.liputan6.com/global/read/5159967/10-tahun-kemitraan-strategis-komprehensif-hubungan-china-indonesia-diharapkan-kian-erat?page=4>.
- Mujiono, D.I.K, & Frisca, A. (2019). Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus. Mulawarman University Press.
- Noudeng, V., Quan, N. V., & Xuan, T. D. (2022). A Future Perspective on Waste Management of Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles in Lao PDR: Current Status and Challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 16169. <https://doi.org/10.3390/ijerph192316169>.
- Nuechterlein, D, E. (1976). National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies* Vol. 2 No. 3. <https://www.jstor.org/stable/20096778?origin=JSTOR-pdf>.
- Pandyaswargo, A. H., Wibowo, A. D., Maghfiroh, M. F. N., Rezqita, A., & Onoda, H. (2021). The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis. *Batteries*, 7(4), 80. <https://doi.org/10.3390/batteries704008>.
- People's Daily. (2023, October 11). China's outbound investment ranks among highest globally. People's Daily Online [http://en.people.cn/n3/2023/1011/c90000-20082248.html#:~:text=China's%20outbound%20direct%20investment%20\(ODI,State%20Administration%20of%20Foreign%20Exchange](http://en.people.cn/n3/2023/1011/c90000-20082248.html#:~:text=China's%20outbound%20direct%20investment%20(ODI,State%20Administration%20of%20Foreign%20Exchange).
- Peters, M. A. (2017). The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism with Chinese characteristics for a new era. *Educational Philosophy and Theory*, 49(14), 1299–1304. <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1407578>.
- Putri, S, O. & Ginanjar, G. (2018). Industry 4.0 in Electronics and Automotives Sectors and Its Prospect for Indonesia's Economic Diplomacy. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018), Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.71>.
- Rana, K. S. (2013). *The Contemporary Embassy: Paths to Diplomatic Excellence*. Palgrave Macmillan.
- Schröder, M., Iwasaki, F., & Kobayashi, H. (2021). Promotion of Electromobility in ASEAN: States, Carmakers, and International Production Networks. *ERIA Research Project Report*.
- State Council Information Office of the People's Republic of China. (2021a, February 22). the State Council issued the "Guiding Opinions on Accelerating the Establishment and Improvement of a Green, Low-carbon and Circular Development Economic System". [Www.gov.cn](http://www.gov.cn). https://www.gov.cn/xinwen/2021-02/22/content_5588304.htm.
- State Council Information Office of the

- People's Republic of China. (2021b, September 22). The Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on the complete, accurate and comprehensive implementation of Opinions on achieving carbon peak and carbon neutrality under new development concepts. Official Gazette of the State Council. Wwww.gov.cn.
https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5649728.htm.
- State Council Information Office of the People's Republic of China. (2021c, October 26). The State Council issued the Notice on Carbon Peaking Before 2030 Notice of action plan. Wwww.gov.cn.
https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm.
- Statista. (2022). Leading export countries globally 2022. Statista.
<https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/>.
- Tan, Y. (2021). China's Rise to Changes in Southeast Asia's Political Landscape. *Advances in Economics, Business and Management Research*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.086>.
- The Diplomat. (2021, September 29). Coal Shortages Force Blackouts Across China. The Diplomat.
<https://thediplomat.com/2021/09/coal-shortages-force-blackouts-across-china/>.
- purwantoTritto, A. (2023). How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold. *Carnegie Endowment for International Peace*; Carnegie Endowment for International Peace.
<https://carnegieendowment.org/2023/04/11/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-new-gold-pub-89500>.
- World Bank. (2022, October 12). China's Transition to a Low-Carbon Economy and Climate Resilience Needs Shifts in Resources and Technologies. World Bank Group.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/10/12/china-s-transition-to-a-low-carbon-economy-and-climate-resilience-needs-shifts-in-resources-and-technologies>.
- World Economic Forum. (2019, April 25). How electrification can supercharge the energy transition. World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/agenda/2019/04/electrification-energy-transition-decarbonization-climate-change/>.
- Wulansari, I., & Aziz, V. (2023). Challenges of transforming Indonesia's circular economy in the context of electric vehicle policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1220(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1220/1/012037>.
- Xinhua.net. (2020, September 23). Xi Focus: Xi announces China aims to achieve carbon neutrality before 2060. Xinhua. English.news.cn. Xinhuanet.com.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/23/c_139388764.htm.
- Yoesgiantoro, D., Sasongko, N. A., Nurbaiti, & Arifianto, B. S. (2022). Defense study on Indonesian nickel processing. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1108(1), 012037.

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012037>.